

PT. BPR TANAH LAUT

2023

- Jl. Pangeran Antasari No. 10 Pelaihari, - Tanah Laut
- 0512-22603

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Tanah Laut mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5 /SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Tanah Laut beserta perubahan-perubahannya.

- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Melindungi kepentingan stakeholder.

Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang mengandung benturan kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR TANAH LAUT

1 Transparency (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku. Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

4 Independency

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5 Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Tanah Laut juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR Tanah Laut sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia.

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: SUPRAPTO
	NIK	: 6301032102650001
	Jabatan	: 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan 2. Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan 3. Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk juga keuntungan perusahaan 4. Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan 5. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan 6. Menetapkan strategi-strategi strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan 7. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, mulai bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang. 8. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian BPR termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, jasa produksi dan penghasilan lain bagi pegawai BPR berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai BPR berdasarkan peraturan kepegawaian BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Pengawas dan /atau pemegang saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: RINANTO
	NIK	: 3315100107880069
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi seluruh pelaksanaan operasional perusahaan. 2. Membuat standar perusahaan mengenai semua proses operasional, produksi, proyek dan kualitas hasil produksi.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Membuat strategi dalam pemenuhan target perusahaan dan cara mencapai target tersebut. 4. Membantu tugas-tugas direktur utama. 5. Mengecek, mengawasi dan menentukan semua kebutuhan dalam proses operasional perusahaan. 6. Merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan dan mengkoordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan. 7. Mengawasi seluruh karyawan apakah tugas yang dilakukan sesuai dengan standar operasional perusahaan. 8. Bertanggung jawab pada pengembangan kualitas produk ataupun karyawan 9. Membuat laporan kegiatan untuk diberikan kepada direktur utama. 10. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya menurut perbandingan yang telah ditetapkan. 11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utamn.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. 2. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. 3. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. 4. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang. 5. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem. 6. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi. 7. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis. 	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: JOKO WURYANTO
	NIK	: 6301031601650002
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan BPR antara lain melalui forum rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi atau melalui penyampaian surat secara tertulis. 2. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Menengah/Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPR serta rencana lainnya, yang disiapkan Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar BPR. 3. Mengikuti, mengawasi perkembangan kegiatan BPR,

	<p>memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dinilai penting dalam rangka perkembangan BPR ke depan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BPR disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. 5. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan BPR. 6. Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan BPR. 7. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 8. Memantau, mengevaluasi dan menyempurnakan efektivitas praktik Good Corporate Governance (GCG) di Perusahaan. 9. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. 10. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR 11. Memastikan bahwa Direksi telah merancang sistem manajemen risiko yang tepat dalam mengelola risiko utama BPR.
No	
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	<p>Nama : FIFIANA FITRI AMALIA</p> <hr/> <p>NIK : 6301034909780002</p> <hr/> <p>Jabatan : Komisaris</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 2. Memastikan bahwa keputusan Direksi telah sejalan dengan sasaran strategik jangka menengah atau jangka panjang perusahaan. 3. Membantu ketua Dewan Komisaris dalam tugasnya menurut perbandingan yang telah ditetapkan. 4. melakukan tugas lain yang diberikan oleh ketua dewan komisaris. </p>
Rekomendasi Kepada Direksi	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. 2. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. 3. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. 4. Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang. 5. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.

6. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi.
7. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	SUPRAPTO	6301032102650001	-	-
2	RINANTO	3315100107880069	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SUPRAPTO	6301032102650001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	RINANTO	3315100107880069	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SUPRAPTO	6301032102650001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	RINANTO	3315100107880069	tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	JOKO WURYANTO	6301031601650002	-	-
2	FIFIANA FITRI AMALIA	6301034909780002	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	JOKO WURYANTO	6301031601650002	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	FIFIANA FITRI AMALIA	6301034909780002	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	JOKO WURYANTO	6301031601650002	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	FIFIANA FITRI AMALIA	6301034909780002	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	640.503.246	2	135.581.214
2	Tunjangan	2	0	2	0
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total			640.503.246		135.581.214

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	0	0
2	Transportasi	0	0
3	Asuransi Kesehatan	0	0
4	Fasilitas lainnya	0	0

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,43	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,20	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,20	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,88	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,01	1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2023-1-16	5	Rapat Internal Pembahasan Laporan Realisasi Perkembangan BPR Tala Semester II Tahun 2022. Hasil Pembahasan : - Pertumbuhan BPR Tanah Laut tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut : a. Posisi aset per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 15,66% dibandingkan tahun 2021. b. Penempatan/tagihan atau simpanan milik BPR pada Bank lain dengan maksud untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan dan sebagai secondary reserve dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka sampai 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 23,36% dibandingkan tahun 2021. c. Baki debit pemberian kredit dan atau pembiayaan oleh BPR kepada pihak ketiga bukan bank sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 8,90% dibandingkan tahun 2021. d. Modal yang disetor oleh pemilik sampai dengan 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp. 6.100.000, ribu. Hal ini dikarenakan rencana penambahan penyertaan modal Pemkab. Tanah Laut masih dalam proses pengusulan. e. Pendapatan bunga / hasil bunga dari bank-bank lain atas penempatan dana dalam bentuk tabungan maupun deposito berjangka dan bunga dari pihak ketiga bukan bank atas kredit yang diberikan serta amortisasi provisi dan pendapatan lainnya periode sampai dengan 31 Desember 2022 tercatat sejumlah Rp.4.380.855,-ribu meningkat sebesar 31,65 % dibandingkan tahun 2021. f. Laba rugi operasional sebelum pajak selama tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.117.244,- ribu g. Dari hasil pendapatan serta biaya sebagaimana digambarkan diatas terlihat bahwa bank mengalami peningkatan untuk memperoleh laba pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 dimana laba tercatat pada posisi 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.112.244,-ribu setelah dikurangi pajak penghasilan dibandingkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 55,03% dibandingkan tahun lalu. kenaikan laba tersebut dikarenakan adanya pendapatan penempatan antar bank, bunga kredit dan lainnya.
2	2023-3-13	5	Rapat Internal Pembahasan Rencana RUPS Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) OJK tahun 2023. Hasil Pembahasan : - Menindak lanjuti hasil pembahasan sebelumnya terkait rencana RUPS laporan keuangan tahunan tahun 2022. - Terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) OJK tahun 2023, Adapun beberapa temuan tersbut adalah sebagai berikut : 1. Terkait Kelemahan pembagian tugas dan wewenang sebagaimana yang tercantum dalam Srtuktur Organisasi dan Tata Kerja. 2. Terkait Penyaluran Kredit Program Gapura Karomah 3. Terkait Strategi dan Infrastruktur Pendukung dalam rangka penanganan kredit bermasalah. 4. Terkait Penerapan POJK Stimulus Covid-19. 5. Terkait Pencairan Kredit selama periode Pemeriksaan. 6. Terkait Administrasi, Pembukuan dan Pelaporan adapun temuan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut : 7. Layanan uang elektronik PT. Finnet Indonesia 8. Kelemahan Aspek perlindungan konsumen pada perjanjian baku kredit 9. Inkonsistensi Informasi Pembagian Laba Tahun 2021.Sesuai rekomendasi pemeriksa BPR Tanah Laut telah menindaklanjuti atas hal temuan tersebut.

3	2023-5-15	4	Rapat Internal Pembahasan Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) OJK tahun 2023, Rencana Hari Jadi BPR Nasional dan Rencana Inhouse Training dan Family Gatering BPR Tanah Laut. Hasil Pembahasan : - Menindak lanjuti hasil pembahasan sebelumnya terkait laporan hasil pemeriksaan OJK, Direksi sudah melakukann tindaklanjut hasil temuan tersebut dan sudah menyampaikan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) . - Terkait rencana hari jadi BPR Nasional, BPR Tanah Laut termasuk salah satu BPR yang direncanakan sebagai tuan rumah untuk menggelar kegiatan hari jadi tersebut, direksi minta arahan dari Dewan komisaris apabila nantinya BPR Tala terpilih sebagai tuan rumah Langkah apasaja yang harus disiapkan. - Terkait rencana Inhouse Training, BPR Tala pada tahun 2023 berencana melakukan IHT dan family Gatering. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi yang didukung oleh kesadaran istri dan keluarga terhadap tugas karyawan dikantor. - Selain family gatering juga dilaksanakan kegiatan IHT dengan tema APU PPT dan literasi keuangan keluarga.
4	2023-7-24	5	Rapat Internal Pembahasan Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) OJK tahun 2023 tahap II dan Laporan Perkembangan BPR Tanah Laut secara umum. Hasil Pembahasan : - Menindak lanjuti hasil pembahasan sebelumnya terkait laporan hasil pemeriksaan OJK tahap II, adapun hasil tindaklanjut adalah sebagai berikut : a. Terkait Kelemahan Pedoman dan Penerapan terkait Manajemen Resiko BPR. b. Terkait Kelemahan dalam Realisasi dan Kebijakan Hapus Buku. c. Terkait Kelemahan Ketentuan Internal Perkreditan. d. Terkait Debitur Inti an. Ladiny Prawitaningrum. e. Terkait Kelemahan Administratif Bilyed Deposito dan Tabungan. f. Terkait Kelemahan Pengawasan Direksi & Komisaris pada Pelaksanaan APU PPT, Tindaklanjut BPR Tanah Laut telah melaukan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris. g. Terkait Kelemahan Sistem Informasi Manajemen dalam Menerapkan Program APU dan PPT, Tindaklanjut BPR Tanah Laut telah melaukan koordinasi kepada Vendor Aplikasi Inti Perbankan sesuai rekomendasi pemeriksa Otoritas Jasa keuangan. - Terkait rencana Penambahan Penyertaan Modal Pemkab. Tanah Laut pada tahun 2023 sudah di usulkan Kembali dan saat ini masih dalam proses pada DPRD Kab. Tanah Laut. - Terkait Investasi Pemkab. Tanah Laut tahap V untuk program kredit gapura karomah sudah terealisasi pada bula Juni 2023. - Perkembangan BPR Tanah Laut pada semester I secara umum baik.
5	2023-9-27	5	Rapat Internal Pembahasan Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) OJK tahun 2023 tahap III dan Laporan Rencana Penggunaan Dana CSR BPR Tanah Laut Tahun 2023. Hasil Pembahasan : - Menindak lanjuti hasil pembahasan sebelumnya terkait laporan hasil pemeriksaan OJK tahap III, adapun hasil pemeriksaan tersebut yaitu Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT masih terdapat kelemahan atas hal tersut Direksi akan melakukan penyesuaian Kebijakan sesuai Rekomendasi Pemeriksa. - Menindaklanjuti Surat Intruksi Bupati Tanah Laut No.6 Tahun 2023 Tentang Pendistribusian Air Bersih Dalam Rangka Penanganan Kekeringan dan Krisis Air Bersih Akibat Kemarau. BPR Tanah Laut ikut berperan membantu distribusi air bersih untuk masyarakat Tanah Laut yang mengalami kekurangan air bersih dengan menggunakan dana CSR.
6	2023-11-23	4	Rapat Internal Pembahasan Rencana FGD oleh Bagian Perekonomi Kab. Tanah Laut terkait Realisasi RBB Tahun 2023 dan Pembahasan RBB Tahun 2024 BPR Tanah Laut, Rencana RUPS RBB Tahun 2024, Rencana Penunjukan AP&KAP untuk audit laporan keuanagn tahun buku 2023 dan tindaklanjut penggunaan Dana CSR BPR Tala tahun 2023. Hasil Pembahasan : - Bagian Perekonomi Kab. Tanah Laut akan berncana melaksanakan FGD tahunan waktu dan tempat (tentative) terkait Realisasi RBB Tahun 2023 dan Pembahasan RBB Tahun 2024. - Direksi telah Menyusun, menyelesaikan RBB Tahun 2024 dan draft sudah disampaikan pada Dewan Komisaris untuk dilakukan koreksi apabila ada masukan, tambahan dan perbaikan terkait target-target yang telah ditentukan. - Direksi telah mencari dan menerima beberapa proposal penawaran dari akuntan public dan kantor akuntan publik untuk audit laporan keuangan PT. BPR Tanah Laut tahun buku 2023. - Laporan tindaklanjut penggunaan dana CSR PT. BPR Tanah Laut tahun 2023, Posisi Laporan bulan September-Oktober 2023 penggunaan dana CSR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk biaya distribusi air bersih sebanyak 69 tandon ukuran 1200 L untuk 7 Desa / Kelurahan yang ada di Kecamatan Pelaihari.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	JOKO WURYANTO	6301031601650002	5	0	83,00%
2	FIFIANA FITRI AMALIA	6301034909780002	5	0	83,00%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2023-09-27	Sosial	Kegiatan Distribusi Air Bersih yang dilakukan PT. BPR Tanah laut sebagai bentuk aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.	Masyarakat Kab. Tanah laut	7.410.000
2	2023-12-03	Sosial	Kegiatan Tablig Akbar dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kab. Tanah Laut yang Ke-58.	Pemerintah Daerah kab. Tanah Laut	4.000.000
3	2023-12-09	Sosial	Dalam rangka untuk ikut meramaikan Hari Jadi Kab Tanah Laut yang Ke-58 dalam hal menyediakan sarana hiburan dan informasi kepada masyarakat PT Bpr Tanah laut berkontribusi terhadap pagelaran wayang kulit jawa.	Pemerintah Daerah Kab. Tanah Laut	2.000.000
4	2023-12-15	Sosial	PT. BPR Tanah Laut turut serta menyelesaikan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam acara Turdes. PT Bpr Tanah Laut berkontribusi menyediakan 50 lembar kaos untuk masyarakat.	Pemerintah Daerah Kab. Tanah Laut	5.000.000

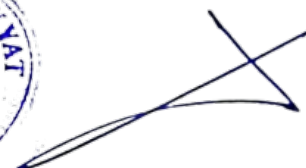
M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Tanah Laut ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Tanah Laut. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Tanah Laut ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Tanah Laut, Terima Kasih.

- Tanah Laut, 23 Januari 2024
Persetujuan Pengantar PT. BPR Tanah Laut



JOKO WURYANTO
KOMISARIS UTAMA

SUPRAPTO
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR Tanah Laut

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666559-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-602709-26012024075618

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

bpr_pelaihari@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-26 07:56:18



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.